

terakhir ini disebut sebagai sikap etnosentrisme. Meskipun dalam kehidupan primitif itu terdapat berbagai perbedaan, seperti variasi umur, sek, pembagian pekerjaan dan status sosial.

Pada mulanya individu-individu terikat dalam sebuah komunitas kecil yang hidup serba sederhana, dari berburu, menangkap ikan sampau pada berladang berpindah-pindah. Masyarakat sederhana secara material lebih mengutamakan terhadap peralatan sebagai sarana penghidupan keluarga-keluarganya. Mereka hidup dengan bahasa dan terikat pada kebiasaan yang sama. Mereka saling berhubungan dengan norma dan nilai yang sama pula. Dari kehidupan ini lahirlah ide moral sebagai aturan dalam bertingkah laku. Kecenderungan terbesar adalah sifat etnis yang pada umumnya seragam, di mana masyarakat tunduk kepada kebudayaan yang dibentuknya sendiri sebagai pegangan hidup pada kurun waktu tertentu.

Selama itu anggota masyarakat pada umumnya terikat dan pasrah pada norma dan nilai-nilai budaya setempat; sedikit kemungkinan seorang pria yang digariskan sebagai sebagai kepala rumah tangga terlibat dalam urusan mencuci baju dan memanak nasi di dapur. Begitu juga halnya dengan status sosial, bahwa orang tua tetap sebagai nara sumber kebaikan hidup bagi golongan muda, dan seakan aib jika orang tua tunduk kepada golongan muda. Sepanjang potensi filosofi nasehat masih dapat menampung aspirasi dan cukup menyediakan cara hidup yang relevan dengan kepetingan umum, maka sepanjang itu pula solidaritas dan persatuan sosial dapat dipertahankan. Keterikatan sosial semacam ini merupakan perekat yang kuat bagi stabilitas kelangsungan kehidupan masyarakat. Keterikatan masyarakat dengan kebudayaan tidak sekedar dilihat dari segi fisik belaka, akan tetapi lebih menghayati makna dan fungsinya bagi kemaslahatan kehidupan yang lebih wajar. Misalnya sebuah jam tangan secara fisik merupakan sarana keindahan, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai faktor pendorong bagi perilaku manusia untuk lebih menghormati waktu. Dengan demikian perjalanan hidup dalam hubungan sosial akan lebih manusiawi, berkemajuan dan berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, khususnya bagi yang terikat dengan perjanjian sosial.

Pemahaman terhadap nilai-nilai budaya itu sangat penting bagi pembentukan pribadi anggota masyarakat dalam berhadapan dengan masa depan yang cenderung rasionalis.

Segala kemajuan teknologi perlu pemahaman yang serius, karena sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang secara realistik menuntut kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Soerjono Soekanto (1982) menjelaskan bahwa perikelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya atau didapatkannya. Dalam hubungan ini manusia mengerti dan mensiasati kebudayaan sebagai kemajuan peradaban yang dapat bermanfaat bagi kepentingan kehidupan manusia secara lebih luas.

Dalam kehidupan masyarakat modern, telah amat banyak tumbuh pola kehidupan yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga segala hubungan sosial diharapkan mampu mencerminkan efisiensi yang didasarkan pada potensi peranan. Dalam pertumbuhannya terbentuklah kebudayaan modern yang amat banyak mengenal kelompok, dan pembagian kerja yang heterogen, berbelit-belit dan fungsi yang beraneka ragam. Kebudayaan modern merupakan suatu kompleksitas kepentingan yang berangsur meninggalkan prinsip keterikatan terhadap kehormatan suatu status tanpa sumberdaya.

Dalam pemikiran modern sehubungan dengan studi tentang implikasi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dipertanyakan kembali konsekuensi unsur-unsur yang tercakup dalam konsep kebudayaan. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak boleh hanya sekedar terpaku pada konsep kebudayaan yang sempit, akan tetapi justru harus dapat memandang eksistensi kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai totalitas pikir, dan hasil-hasil karya manusia. Menurut Koentjaraningrat (1984), bahwa unsur universal ... yang merupakan isi dari pada semua kebudayaan yang ada di dunia ini adalah:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan,
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan,
3. Sistem pengetahuan,
4. Bahasa,
5. Kesenian,
6. Sistem mata pencaharian hidup,
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Pada masyarakat adat yang masih kuat menganut tradisi daerah (lokal), segala sesuatu yang menyangkut urusan adat tidak boleh diselesaikan atas kemauan sendiri, melainkan dengan cara musyawarah melalui institusi adat istiadat setempat; dari musyawarah itu akan diperoleh keputusan bersama. Pada hakekatnya tradisi diciptakan melalui tindak dan

kelakuan orang-orang melalui pikiran-pikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,... (Sayogyo dan Pujiwati Sayogyo, 1983). Menurut Koentjaraningrat (1984), bahwa suatu sifat yang positif dalam mentalitas kita adalah konsep yang merupakan salah satu unsur dalam nilai gotong royong. Unsur itu sebenarnya merupakan suatu tema berpikir: bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh sistem sosial dari komunitas dan masyarakat sekitarnya, dimana ia merasa dirinya hanya sebagai suatu unsur yang ikut terbawa dalam suatu proses peredarannya. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berfungsi sebagai landasan bersikap dan berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam setiap kegiatan kemasyarakatan selalu berpedoman pada norma-norma sosial yang bersangkutan dengan tatacara pergaulan menurut tradisi lokal yang berlaku. Begitu juga dengan kegiatan yang berhubungan dengan usaha tertentu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dan keluarga, tidak lepas dari tuntunan tradisi yang berlaku sebagai adat istiadat masyarakat setempat.

Dalam hubungannya dengan pergeseran gaya hidup yang tradisional kearah gaya hidup yang modern, semakin banyak tantangan dan masalah yang dihadapi oleh suatu negara yang perlu untuk ditangani secara serius. Dalam hal ini sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan dari para ahli atau pihak yang berwenang untuk segera menilai setiap unsur yang menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk menghadapi berbagai tantangan itu mau tak mau haruslah dilengkapi dengan kemampuan dan keahlian yang tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan itu tentu saja harus diupayakan untuk membangkitkan semangat masyarakat supaya lebih tanggap terha setiap perkembangan dan gejala-gejala sosial yang timbul.

Perhatian utama dalam setiap perubahan kehidupan masyarakat adalah kebudayaan yang mencakup ide-ide, nilai-nilai, norma dan pola kelakuan manusia pada umumnya diharapkan dapat seimbang dengan perkembangan-perkembangan dibidang lainnya, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan benda-benda hasil karya manusia dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai keseimbangan perkembangan seperti yang diharapkan perlu adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, terutama kebijaksanaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pokok masyarakat yang tergolong lemah atau dibawah standar.

Masyarakat yang dimaksud tergolong lemah ini adalah golongan masyarakat yang tertinggal atau tidak mampu mengikuti, menyesuaikan diri dan tidak berkesempatan menerima kemajuan serta hasil-hasilnya. Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya bermukim di daerah perdesaan atau perkotaan kumuh yang hidup sebagai penyandang ekonomi lemah. Taraf teknologi mereka ini belum mencapai tingkat kemungkinan untuk dapat memanfaatkan hasil pembangunan, disamping tidak berkemampuan untuk menguasai lingkungan alam sekitarnya. Padahal sesungguhnya kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung dari besarnya kemampuan dan keikutsertaan golongan masyarakat terbesar. Tidak hanya sekedar sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan yang secara nyata diketahui telah berkorban jiwa dan raga tanpa ikutserta menikmati hasil-hasilnya.

Dalam suatu lika-liku kehidupan masyarakat itu pernah terjadi dialog antara sesama pekerja bangunan sebuah hotel berbintang. Dialog ini berbunyi:

*mengapa kamu setiap hari kerja selalu menyempatkan diri tidur?, tidak takut di PHK? dengan ringkas dijawab, mumpung belum jadi hotel megah, karena saya tahu pasti nanti saya tak akan pernah bisa tidur di sini.*

Perlu disadari bahwa justeru golongan masyarakat yang telah siap bekerja keras itulah yang telah turut membangun dan menyelamatkan negara dari ketertinggalan, kendatipun diri mereka sendiri sering terlupakan bahkan masih diancaman kelaparan. Di pihak lain masyarakat petani di desa, juga telah pula berkorban untuk menghidupi bangsa dan pemimpin-pemimpinnya dengan bercocok tanam, kendatipun kadang-kadang mereka tidak sempat menikmati hasil pertaniannya. Bahkan banyak diantara mereka yang pasrah kehilangan lahanya akibat kepicikan oknum penguasa dan pengusaha serta ketidakadilan dalam penerapan hukum. Jadi sungguh naib, jika pengorbanan mereka dalam mendukung dan memberikan kemakmuran pada negara dan bangsanya harus pula menerima balasan air tuba.

Dalam prinsip negara hukum yang berkeadilan, mestinya pemerintah bertanggung jawab terhadap jaminan hidup dan penghidupan masyarakat, yaitu upaya memajukan dan mempertinggi kesejahteraan. Harapannya adalah agar tumbuh rasa dan semangat persatuan, perjuangan serta semangat untuk membangun negaranya dengan penuh keyakinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu tentu harus memperhatikan dan mampu menggali serta memberdayakan potensi budaya masyarakat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan

inovasi dan teknologi baru perlu disesuaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan kultural diantara mereka. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perpecahan dan hambatan proses pembangunan, khususnya peningkatan terhadap bidang perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat harus searah dan mendapat dukungan kebudayaan yang dianut. Jika tidak, maka kebudayaan setempat bisa menjadi faktor penghambat utama dalam proses pembangunan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial pada umumnya.

Bidang kebudayaan masyarakat perlu mendapat perhatian yang mendalam pula, karena sistem kebudayaan di Indonesia adalah merupakan kekuatan tersendiri dalam menunjang kesuksesan pembangunan secara nasional. Mengapa demikian..? oleh karena kebudayaan sekaligus sebagai bidang kecerdasan yang abstrak sifatnya, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang erat kaitannya dengan adat tata-kelakuan masyarakat. Itulah sebabnya maka sistem kebudayaan Indonesia dapat dikatakan sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan diri dari ancaman dan tantangan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus terhadap keberadaan institusi lokal/tradisional dan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat dengan segala tradisi yang dianut, jika dikehendaki hasil maksimal dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. Dalam hal ini sekaligus diperlukan dukungan tokoh-tokoh adat.

Keterlibatan tokoh adat dalam masyarakat hukum adat merupakan sumber etika kultural tentang cara bersikap dan berperilaku kearah kehidupan yang lebih baik. Masyarakat pada umumnya mengakui bahwa tokoh adat memiliki konsistensi yang kuat terhadap segi-segi positif hukum adat atau kebudayaan lokal yang berlaku. Anggota masyarakat cenderung lebih mudah mengerti dan melakukan berbagai anjuran dan nasehat tokoh adat secara nyata dalam setiap upaya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Tata-kelakuan sebagai wujud kebudayaan yang tertanam dan tumbuh begitu kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sangat dipertahankan keberadaanya. Norma-norma yang berlaku di dalamnya dianggap dapat berfungsi sebagai kekuatan mengatur dan mengendalikan berbagai perbuatan menyimpang. Tata-kelakuan merupakan pedoman dasar setiap aktivitas manusia dalam berinteraksi, berhubungan dan bergaul dalam

kehidupan masyarakat. Dari masa ke masa tata-kelakuan itu senantiasa diikuti dan dihayati sebagai bagian dari kehidupannya. Latar belakang keterlibatan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat semacam inilah yang perlu dijadikan bahan pertimbangan pihak yang berwenang dan para pembaharu dalam upaya menyikapi unsur-unsur budaya mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan, sehingga kemudian dapat mengevaluasi sumber daya norma-norma yang relevan dengan tuntutan pembangunan dan masa depan masyarakat. Seharusnya sejak dini hal ini dilakukan agar evolusi perubahan sikap masyarakat terhadap tuntutan pembaharuan itu dapat tumbuh secara wajar dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Pada akhirnya yang paling penting adalah segera memperlihatkan secara nyata manfaat dari hasil-hasil kebijaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, setidaknya terhindar dari sikap dan perilaku otoriter. Ringkasnya, dengan upaya memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, berarti telah menunjukkan langkah pendekatan yang positif bagi lancarnya proses pembangunan.

Masyarakat pada hakekatnya mempunyai kekuatan tersendiri dalam menunjang keberhasilan pembangunan, jika kebijaksanaan pembangunan itu benar-benar diwujudkan atas dasar aspirasi dan pengakuan tulus dari masyarakat yang bersangkutan. Ambillah suatu contoh, kebijaksanaan tentang pola hidup sederhana yang tumbuh dari kalangan pembaharu dan pembuat keputusan, dengan maksud mengurangi tingkat konsumsinya dalam rangka re-alokasi sumber daya dari kebaikan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Bersamaan dengan itu dipihak lain pada masyarakat perkotaan, banyak timbul krisis lapangan kerja yang perlu segera ditanggulangi. Karena kalau tidak, penyelamatan masyarakat miskin sama sekali tidak ada artinya, bahkan justru dapat menimbulkan kemelaratan yang lebih parah. Upaya ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hambatan struktural, terutama pada masa-masa perubahan.

Menurut Soedjatmoko (1985), bahwa ... dipihak lain, sebaliknya, pembinaan suatu masyarakat yang penuh partisipasi memerlukan adanya kebebasan sebagai persyaratan esensial guna mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. selanjutnya ditegaskan pula bahwa otonomi lokal, keberdikarian dan paratisipasi yang efektif secara sosial pada tingkat desa merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan itu.

Pendapat Soedjatmko tersebut mengingatkan kita kepada implikasi kebudayaan dalam profil kehidupan masyarakat miskin, bahwa sesungguhnya kehidupan ideal yang menyangkut nilai-nilai, norma-norma dan ketata-lakuan yang dianut masyarakat adalah sebagai pengatur dan mengarahkan kebaikan hidupnya. Hal ini diibaratkan oleh Karl Mannheim sebagai lampu pengatur lalu-lintas yang mengatur dan menghindarkan kekacau-balauan. Namun meskipun demikian kita sama sekali tidak mengharapkan masyarakat pada umumnya terlalu jauh hanyut dalam impian-impian mereka sendiri secara lokal. Mereka harus tanggap dengan kenyataan pada masa-masa perubahan seperti sekarang ini, artinya nilai-nilai dan norma-norma yang melekat dalam kehidupan masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan. Secara rasional realisasi pendekatan asas musyawarah terhadap masyarakat penting untuk dilembagakan agar tercipta keselarasan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai rasional untuk menuju tatanan kehidupan yang baru. Upaya ini membutuhkan waktu yang relatif panjang, kesabaran, dan kehati-hatian khusus, karena dalam proses perubahan nilai-nilai tradisional masyarakat kearah kehidupan yang lebih modern, sangatlah banyak hambatan dan tantangannya. Dalam prakteknya tidak sedikit kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan; sering terjadi konflik antara pihak agen pembangunan dengan anggota masyarakat. Agen pembangunan masih kurang mapan dalam mengemban tugas; masih ada kelemahan dalam beradaptasi dengan tradisi masyarakat setempat. Agen pembangunan kurang memperhitungkan keberadaan institusi tradisional yang masih hidup tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Benturan yang sering menjadi dilema adalah karena disatu pihak masyarakat relatif masih tergantung pada hukum adat dan tunduk kepada tokoh adat, sementara dipihak lain mereka dihadapkan dengan cara kerja yang dianggap rumit dan relatif asing, kendatipun pada dasarnya mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ada beberapa hambatan kultural yang acapkali berlawanan dengan kegiatan pelaksanaan program pembangunan masyarakat, yaitu:

1. Anggota masyarakat enggan (ragu) mengikuti langkah-langkah program pembangunan; mereka masih lebih condong tunduk kepada institusi lokal dan norma-norma hukum adat.

2. Inovasi baru tentang teknik peningkatan kualitas hidup yang ditawarkan oleh kader-kader pembangunan pada umumnya belum dapat dipahami sebagai kepentingan sendiri. Masih terdapat perilaku yang kontradiktif terhadap pelaksanaan program pembangunan; masih ada prasangka buruk terhadap inovasi baru yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.
3. Masyarakat masih menganggap institusi lokal/tradisi dan hukum adat setempat sebagai pedoman pergaulan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik; alasannya karena belum ada pedoman kerja baru yang membuktikan secara nyata dapat memenuhi kepentingan masyarakat
4. Tokoh-tokoh adat pada umumnya belum menunjukkan adanya peluang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian institusi tradisional dengan institusi-institusi modern yang lebih menjanjikan kecepatan dalam upaya peningkatan kualiti hidup keluarga. Akibatnya anggota masyarakat yang selama ini masih menghormati dan patuh terhadap nasehat atau anjuran para penyimbang adat tersebut tetap terbelenggu dalam lingkaran tradisi lokal yang berlaku.
5. Inisiatif para generasi muda dalam usaha menciptakan pola kerja baru yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik masih relatif terbatas.

Sikap tradisional lainnya yang dapat menghambat proses perubahan menurut Soerjono Soekanto (1982) adalah suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta anggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tak dapat dirubah, menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah apabila golongan konservatif yang berkuasa dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan tradisi masyarakat desa petani, Robert Redfield (1985) menjelaskan bahwa pandangan hidup satu kaum tani tertentu akan terdapat mempunyai kesamaan-kesamaan dengan kaum tani lainnya, akan tetapi tidak senantiasa pada titik-titik kesamaan yang sama. Ada tiga sikap atau nilai yang ada bagi petani tradisional, yaitu: sikap yang intim dan hormat terhadap tanah; ide bahwa pekerjaan pertanian adalah baik dan bahwa perdagangan tidaklah terlalu baik dan tekanan terhadap kegiatan produksi sebagai suatu kebajikan utama. Masyarakat desa pada umumnya relatif tidak tergantung pada usaha-usaha bisnis, melainkan lebih banyak memiliki sikap lugas terhadap kerja, kepuasan dalam bekerja lama dan keras di ladang, ketidaksudian menerima petualangan atau spekulasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut berarti pihak instansi yang berwenang perlu upaya pemasyarakatan program pembangunan secara berkesinambungan, nyata dan kegiatan-kegiatan yang mudah dipahami masyarakat serta tidak berseberangan dengan hukum adat dan institusi lokal yang berlaku. Dengan demikian diharapkan usaha pencapaian sasaran dan tujuan program dapat lebih mudah dicapai. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan teknis pendekatan, pencermatan dalam mengidentifikasi, menginterpretasi dan merekayasa makna kebudayaan lokal, beradaptasi dan memberdayakan potensi para tokoh adat kedalam gerak langkah kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Koentjaraningrat (1984) mengatakan bahwa untuk bersikap toleran terhadap pendirian-pendirian lain; tentunya selama pendirian lain itu tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan kita, maka pendirian lain itu kita biarkan hidup dan kita usahakan untuk tidak memerangi atau membasminya. Perlu diupayakan penerapan program pembangunan yang dapat menunjukkan hasil nyata dan lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan keinginan mereka merubah sikap untuk tidak tergantung dengan adat-istiadat yang kini semakin kurang efektif untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pokoknya.

S. Mangunsarkoro (1950) kemudian memperjelas bahwa faham hidup kita yang menganggap hidup miskin dan membuang keduniawian itu yang paling tinggi derajatnya menurut ukuran kemanusiaan harus kita rubah. Sifat yang negatif itu harus berganti dengan sikap yang positif. Kita harus tetap mempunyai faham hidup kebatinan yang tinggi, tetapi dalam aturan hidup lahir, kita harus dapat mewujudkan bentuk yang sesuai dengan tingkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia pada masa sekarang ini. Dikatakan bahwa untuk kepentingan hidup ekonomi ... perlulah rakyat bersifat lebih aktif dari pada sekarang. Sikap "nrimo" dan fatalistis yang sekarang masih merajalela dan sering menjadi kedok kemalasan itu harus hilang.

Budhy Prasadja (1980) mengatakan, ... bahwa rencana pembangunan antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kepicikan berpikir tradisional. Itulah sebabnya maka faktor manusia merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan. Potensi manusia merupakan modal

dasar yang perlu digali karena dengan begitu berarti mempermudah kita dalam menggerakkan pembangunan, yaitu dengan melibatkan secara total sumber daya manusia.

Ada beberapa cara pembangunan masyarakat desa menurut A. Suryadi (1983), yaitu dengan mempengaruhi pikiran, sikap dan tingkah laku orang-orang supaya lebih baik. Ukuran suatu masyarakat dapat dikategorikan baik, ialah apabila orang-orang tinggal didalamnya, karena didalamnya tersedia kondisi-kondisi yang dapat menuntun orang-orang kepada kehidupan yang membahagiakan, dan bila kita menerima ini maka kriteria untuk suksesnya suatu kerja pembangunan masyarakat desa ialah membuat lebih banyak orang lebih puas dengan kehidupan yang dilakukannya. Jika unsur kepuasan yang menjadi penilaian terhadap masyarakat desa, maka dalam kerja pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan yang berlaku umum. Dijelaskan bahwa agar kerja badan pembangunan masyarakat desa berakhir dengan kemajuan riil, maka hendaknya ia berakhir dengan timbulnya taraf kepuasan umum yang menyeluruh didalam masyarakat.

Sementara itu bagi kehidupan masyarakat pramodern, hambatan dan tantangan pembangunan biasanya tumbuh dari tuntutan kebutuhan hidup yang senantiasa bertambah, sementara tidak diimbangi oleh perubahan pola hidup yang rasional, pertumbuhan cita-cita, kreativitas dan keterampilan kerja. Ditengah-tengah kesenjangan itu sering terjadi penyimpangan perilaku dan penghianatan terhadap nilai-nilai moral, norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Jika kondisi ini berlangsung terus tidak tertanggulangi, maka tidak mustahil kebudayaan bangsa yang luhur dan tinggi nilainya itu semakin terkikis serta jauh dari pembaharuan. Sebagai contoh konkrit pada kehidupan kota, tentang pelaksanaan segala rupa perizinan jika tanpa uang pelicin, uang rokok, atau entah apa lagi namanya ..., maka bersiaplah untuk menunggu proses penyelesaiannya sampai berminggu-minggu lamanya. Dalam benak kita berkata, gila ... ! macam prangko saja, ada yang biasa, ada yang kilat dan ada pula yang tercatat, atau mungkin tak selesai sama sekali. Tapi kalau ada hubungan famili, saudara, kolega, atau kenalan istimewa, wah..! jelas persoalannya tidak akan sama dengan orang yang belum dikenal. Di sinilah awal berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh masyarakat. Tumbuhnya perilaku semacam ini mencerminkan pembaharuan dan pembangunan yang tersesat. Untuk hal ini dapat disimak pengalaman pribadi Mochtar Lubis (1985) dalam bukunya

yang berjudul Manusia Indonesia sebuah pertanggung-jawaban, yang kisahnya sebagai berikut:

Pada suatu kali saya naik kapal terbang keluar negeri. Di depan saya duduk dua orang asing, kulit putih, sedang berbincang-bincang dengan asyik. Karena pesawat udara sudah meninggalkan wilayah teritorial Republik Indonesia, wah mereka bicara lancang sekali. Yang seorang menceritakan betapa dia sudah bosan terlalu lama tinggal di hotel, menunggu-nunggu segala rupa izin dan persetujuan untuk penanaman modalnya.

*"Berapa lama kamu sudah menunggu?" tanya kawannya berbincang.*

*"Aduh, sudah empat bulan, menjelang bulan kelima," sahutnya.*

*"Ah, kamu salah. kamu tak tahu bahwa di Jakarta itu uang memperlancar segalanya ..... You know," tambahnya, "you can buy everybody in Jakarta.*

*Wah, buseet. Darah naik ke kepala saya. Saya kan penduduk Jakarta juga. Ini penghinaan luar biasa. Naluri saya menyuruh saya berdiri, dan menampar si mulut lancang bule itu. Tapi pikiran saya berkata, kalau saya tampar, dan dia tak mau terima, lantas mengadukan saya ke pengadilan, lantas bagaiman. Kalau saya kalah perkara, karena buktinya lebih kuat dari bukti saya, kan bisa berabe? Jadinya saya urut dada saja, bersabar.*

Kejadian lain lagi yang agak lucu, tapi cukup membuat hati menjadi jengkel. Pengalaman saya sewaktu masih Kuliah di Yogyakarta. Saya suatu kali naik becak dari daerah Pingit (Jl. Kiyai Mojo) untuk menuju Malioboro, lalu terjadi tawar-menawar. Maklum uang saku sangat terbatas pada waktu itu. Kisahnya begini:

Pada waktu saya tanya berapa ongkosnya, pinten mas..., si tukang becak menjawab, mpun sekawan-atus mawon. Saya kemudian balik menawar dengan bahasa jawa yang terseok-seok, "kalih-atus seket nggih.." Kemudian tukang becak menyetujui, kendati agak kasar perlakuannya. Setelah becak mulai meluncur, dalam hati saya ... lho kok begini? Becak berjalan dengan kecepatan tinggi, berbelok-belok, masuk lobang, pokoknya tidak menyenangkan. Saya lalu menegor tukang becak, "Mas... alon-alon mawon, mangke ndak nubruk". Lalu si tukang becak serta merta menjawab dengan ketus, "rongatus seket kok njaluk slamet, luweh".

Mendengar jawaban itu saya tidak bisa berpikir panjang lagi, lalu saya minta berhenti dan saya bayar empat ratus rupiah. Sambal jalan kaki, saya berpikir dan bertanya: apakah benar pengalaman ini bisa diteladani? barangkali bisa jadi bahan koreksi diri agar hidup jadi lebih dewasa dan hati-hati dimasa depan.

Gambaran lain misalnya, kebiasaan wanita barat memakai baju mini, belum tentu berarti supaya kaum pria melihat tubuhnya lalu tertarik, merangsang dan tergila-gila padanya, akan tetapi karena mungkin di negaranya mereka memang memiliki kebudayaan berbeda atau mungkin karena di negaranya tidak setiap waktu bisa menikmati cahaya matahari, lalu mereka membuka pakaiannya, seperti dapat disaksikan di lokasi-lokasi wisata pantai di Indonesia. Toh mereka memang memiliki kebudayaan yang tidak sama dengan masyarakat Indonesia. Ironisnya wanita-wanita Indonesia kebanyakan membuka bajunya, sengaja dimaksudkan untuk menarik perhatian kaum pria, yang ganteng agar kesengsem, yang punya mobil atau yang tebal kantongnya. Menurut hemat saya justeru kenyataan terakhir ini merupakan indikator penerapan budaya yang salah kaprah, atau menunjukkan keterbelakangan budaya yang terjerumus dalam pelecehan budaya, yang kemudian bisa merembet pada pelecehan seksual, moral, hukum dan harkat martabat bangsa Indonesia secara luas.

Contoh-contoh di atas, jelas menunjukkan tanda-tanda adanya kemerosotan budaya bangsa sebagai akibat ketidakmampuan dalam upaya pelestarian dan penanaman potensi dan sumber daya norma-norma dan nilai-nilai moral sebagai jati diri bangsa. Hal ini merupakan keprihatinan mendalam yang perlu segera mendapat uluran tangan dari kalangan budayawan, cendekiawan dan para pakar umumnya untuk melakukan rekulturasasi searah dengan upaya rasionalisasi dalam kehidupan masyarakat modern yang berkemajuan. Perlu dicatat bahwa ciri-ciri masyarakat modern yang berkemajuan itu mencakup syarat-syarat:

1. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya tarap kehidupan dan penghidupan manusia sebagai anggota masyarakat.
2. Modern berarti berkemanusiann yang tinggi nilai peradabannya pergaulan hidup bermasyarakat.

Dalam masyarakat modern diharapkan banyak tumbuh kelompok-kelompok sosial dan ekonomi yang seimbang antara kebutuhan sosial dan ekonomi, mempunyai kepentingan bersama didalam integritas posisi-posisi sosial dalam rangka mencapai tujuannya. Didalam gejolak hingar bingarnya kehidupan masyarakat modern, di mana terdapat pola-pola konsumsi dan pemakaian jasa anggota masyarakat yang cukup tinggi, harus bisa diimbangi atau dikontrol dengan moralitas yang berakar dari nilai-nilai budaya. Oleh karena dalam kehidupan masyarakat modern perlu adanya upaya pelestarian dan pemeliharaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan baik, agar kemajuan bangsa tetap konsisten dan terhindar dari perangkap arus pola modernisasi yang merusak peradaban.

Kehidupan modern yang dikehendaki adalah kemajuan yang memiliki nilai kesejahteraan lahiriah dan rohaniah, yaitu kesejahteraan yang terjadi atas dasar persesuaian antara prinsip efisiensi dengan nilai-nilai moral budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Untuk itu diharapkan agar tidak terjadi pengingkaran terhadap suara nurani bahwa sesungguhnya yang benar, baik dan yang pantas itu merupakan tuntunan dan kepuasan hidup, atau sebesar-besarnya dapat menerangi jalan rasio manusia yang serba tak puas, dan bukan sebaliknya merusak pikiran manusia kearah sikap perilaku yang serakah dan angkuh.

Menurut Soedjito Sosrodihardjo (1986), bahwa ... untuk Indonesia sekarang ini keadaannya masih belum terlambat, bahkan baru saja mulai. Masih ada waktu untuk memperhitungkan norma-norma tradisional yang mungkin masih harus kita pertahankan. Misalnya norma kekesatriaan, apakah hal ini masih perlu kita pegang teguh? Norma-norma inilah sebenarnya yang hingga kini dapat mempertahankan bangsa kita. Disamping itu sebenarnya setiap suku di Indonesia ini pada mulanya dan hingga kini pun mempunyai subculture sendiri-sendiri. Dengan adanya bahasa yang sama, maka pelbagai macam subculture ini masih tetap dipertahankan, hanya diciptakan penghubung sehingga beberapa subculture ini merupakan satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Subculture yang ada tidak perlu dihapus. Unsur-unsur kebudayaan daerah masih perlu dipertahankan dan bahkan jangan sampai kehilangan pegangan, asal saja ikatan besar, yaitu ikatan sebagai suatu bangsa tidak retak karenanya. Sebab jika masyarakat kehilangan pegangan, maka mudah anomi.

Subculture atau kebudayaan khusus dalam kehidupan masyarakat sehari sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Keterikatan seseorang terhadap kebudayaan khusus itu disebabkan adanya proses pembiasaan bersikap dan berperilaku dengan patokan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku setempat dalam waktu yang cukup lama. Dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti Indonesia potensi kebudayaan khusus ini sangat besar, yaitu terwujud dalam berbagai bentuk adat istiadat, etnis atau suku, sikap dan persepsi, etika, bahasa, agama, ras, dan kepercayaan, pekerjaan dan cara bertindak.

Kehidupan masyarakat majemuk dalam konsep persatuan dan persatuan bangsa perlu dipelihara secara berkesinambungan agar perbedaan-perbedaan yang ada tidak berkembang menjadi letupan konflik. Pada prinsipnya kebudayaan khusus itu riil dan konkrit yang mengandung makna sikap yang menentuhkan nurani dan harga diri. Oleh karena itu perlu mengedepankan kesadaran dan keterbukaan untuk membiarkan hak-hak asasi tiap golongan masyarakat untuk memiliki jati diri yang khusus pula. Di tengah-tengah perbedaan itu perlu pengembangan sikap kesediaan untuk berdampingan, saling memahami dalam solidaritas sosial, saling menyulam atas kekurangan dan saling menjalin hubungan atas persamaan.

Secara lokalitas kehidupan masyarakat memiliki ciri adat istiadat yang khusus, misalnya adat perkawinan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Unsur kedaerahan juga membawa pengaruh terhadap pembentukan kepribadian dalam hal minat, profesi dan kegiatan-kegiatan khusus, ada golongan masyarakat daerah tertentu yang cenderung menyukai pekerjaan berdagang, seperti Padang dan Jawa Barat. Sedangkan golongan masyarakat Lampung pada umumnya lebih suka bertani, khususnya tanaman keras, seperti kelapa, cengkeh dan kopi. Orang-orang Lampung memiliki adat tentang tata cara musyawarah kawin lari, kawin jujur; ngangken, ngakuk khagah, dan lain-lain. Di Jawa ada adat tujuh bulan kehamilan, ngunduh manten, kebiasaan acara trah keluarga, dan lain-lain.

Dari segi perkembangan daerah, diketahui bahwa orang-orang kota relatif lebih terbuka, berani berpendapat, fleksibel, inovatif dan rasional, dibandingkan dengan orang-orang yang berada di desa yang cenderung skeptis, kurang berani mengemukakan pendapat,

guyub, emosional, dan tradisional konservatif, sehingga kecil kemungkinan untuk merubah sikap dan kebiasaan-kebiasaan. Begitu juga jika dilihat dari segi stratifikasi sosial, di mana masyarakat Indonesia tergolong dalam kelas-kelas sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik. Kelas-kelas itu menunjukkan kehormatan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang tergolong dalam kelas atas memiliki kepribadian dan kebiasaan yang berbeda dengan golongan masyarakat yang berada dalam kelas bawah, baik dalam hal cara berpakaian, cara bicara, cara makan, memilih sarana olah raga, rekreasi dan lain-lain.

Davis (Duncan Mitchell, 1984) mengatakan bahwa satu dari padanya adalah perlunya menabung prestise menurut pentingnya suatu kedudukan sosial bagi masyarakat; atau minimal, kedudukan-kedudukan yang kurang penting jangan dibiarkan menyaingi kedudukan-kedudukan yang penting. Satu hal lagi ialah bahwa kedudukan-kedudukan sosial menghendaki kemahiran-kemahiran, keterampilan atau tanggungjawab yang berbeda-beda dari kaula yang mendudukinya. Kemahiran-kemahiran tertentu mungkin jarang dijumpai dan latihan akan memakan waktu dan uang banyak. Oleh karena itu kedudukan-kedudukan sosial demikian, yang menghendaki persediaan, mesti diberi ganjaran-ganjaran yang tinggi, dan salah satu caranya adalah dengan memberinya nilai tinggi; prestise yang diberi dengan cara ini timbul dari penilaian umum.

Adham Nasution (1983) menjelaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi erat bergandengan. Setiap masyarakat menghasilkan kebudayaan dan setiap kebudayaan pasti ada masyarakatnya. Masyarakat modern akan melahirkan kebudayaan modern, dan sebaliknya kebudayaan modern akan pula melahirkan masyarakat modern. Nasution memberi contoh pada perbedaan corak kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Corak kebudayaan Bali lebih religius dan seni dari pada Jawa, terdapat perbedaan dalam susunan desa, organisasi pengairan, pembagian kerja antara lalai-laki dan perempuan, dan sebagainya.

Dari berbagai perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat itu terdapat sifat-sifat yang universal. Clark Wissler (Adham Nasution, 1983) menyebutnya sebagai *universal pattern of culture*, yaitu:

1. bahasa (lisan dan tulisan);

2. peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya);
3. kesenian, seperti melukis, mengukir, musik;
4. mythologi dan pengetahuan ilmiah;
5. praktek-praktek keagamaan;
6. keluarga dan sistem kemasyarakatan yang meliputi bentuk-bentuk perkawinan, warisan, sosial kontrol, sport;
7. milik;
8. pemerintahan dan peradilan;
9. perang.

Terlepas dari pendapat Wissler, bahwa dalam kehidupan masyarakat manusia didorong untuk memperoleh keterampilan, cara-cara hidup dan nilai-nilai, serta norma-norma yang dapat dijadikan pegangan. Di sinilah manusia menunjukkan sikapnya yang dinamis, mencari dan mencari, juga menciptakan sesuatu yang dapat berguna demi kepuasan hidupnya. Abu Ahmadi (1985) mengibaratkan, bahwa manusia adalah sumber kebudayaan, dan masyarakat adalah satu danau besar, ke mana air dari sumber- sumber itu mengalir dan tertampung. Manusia mengangsu (mengambil) air dari danau itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa manusia itu "mengangsu apikulan warih" (ambil air berpikulan air). Sehingga tidaklah habis air dalam danau itu, melainkan bertambah banyak karena selalu ditambah oleh orang yang mengambil air tadi. Jadi erat sekali hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan. Kebudayaan tak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat dan eksistensi masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan.

## **2. Strategi Kebudayaan dalam Pembangunan**

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai siasat, manajerialism atau cara yang dipakai sehubungan dengan upaya pencapaian suatu tujuan dengan konsekuensi tertentu. Siasat-siasat yang berhubungan dengan upaya mengelola aspek sosial untuk meningkatkan kerukunan masyarakat dapat disebut sebagai strategi sosial. Kalau cara-cara yang dipakai militer untuk memenangkan suatu peperangan melawan musuh dapat disebut strategi militer. Jika cara-cara itu berhubungan dengan upaya memberdayakan potensi nilai-nilai budaya dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang manfaat nilai-nilai budaya bagi kehidupan masyarakat, maka dapat disebut sebagai strategi kebudayaan.

Menurut Ali Moertopo (1978), bahwa strategi pada hakekatnya berarti: hal-hal yang berkenaan dengan cara dan usaha menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya

suatu masyarakat, suatu bangsa, untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut Moertopo memperinci pendekatan strategis ke dalam lima ciri-ciri, yaitu sebagai berikut: